BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek yang dilaksanakan selama satu bulan mulai dari tanggal 1 Agustus – 30 Agustus 2013 yaitu penulis ditempatkan di bagian Bendahara Pengeluaran (Pajak) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Pelaksanaan kuliah kerja praktek pada bagian akuntansi ini dibimbing oleh Ibu Tiur Agnesia T.S., SE.Ak selaku Staff Bendahara Pengeluaran.

3.1.1 Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Oleh karena itu, prosedur sangatlah penting bagi suatu instansi pemerintah atau perusahaan agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam.

Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2001: 169) mengemukakan bahwa : "Prosedur adalah urutan kegiatan krelika, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".

Pengertian prosedur menurut Azhar Sutanto (2008:264), mengemukakan bahwa :

"Prosedur adalah rangkaian aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu tugas yang saling berhubungan dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk menjamin keseragaman didalam pelaksanaannya.

Prosedur hendaknya disusun secara sistematik dimana tujuannya adalah untuk menetapkan pertanggung jawaban serta untuk memberikan informasi yang lengkap.

Penyusunan prosedur dalam perusahaan atau instansi harus didasarkan pada pedoman guna mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan atau instansi tersebut. Apabila keadaan berubah harus diperhatikan pula mengenai prosedur yang telah dilakukan, karena sebab–sebab dari tersebut akan bermanfaat sebagai bahan informasi yang dibutuhkan untuk kebijaksanaan selanjutnya.

3.1.2 Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Pemotongan atau pemungutn pajak (*With Holding System*) merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.

Pengertian *with holding system* menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2003:18) mengemukakan bahwa :

"*With holding system* adalah sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak".

Pengertian *with holding system* menurut Mardiasmo (2006:8) mengemukakan bahwa :

"*With holding system* adalah sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak".

3.2 Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh penulis selama melakukan kegiatan kerja praktek di Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah membantu pegawai di sub bagian bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam penatausahaan anggaran, menginput data-data serta mempelajari data-data dan modul mengenai bendahara mahir pajak yang diberikan oleh pegawai di sub bagian bendahara pengeluaran.

Selama penulis melakukan kerja praktek, kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

Minggu Pertama

1. Perkenalan lingkungan dan Pembimbing di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.
2. Pengarahan untuk kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan selama kerja praktek di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.
3. Membandingkan data manual dengan data yang sudah terkomputerisasi.

Minggu Kedua

1. Menginput data ke dalam komputerisasi maupun sistem aplikasi SIMDA.

Minggu Ketiga

1. Wawancara dengan pembimbing perusahaan mengenai kegiatan perpajakan khususnya tentang prosedur pemotongan dan pemungutan pajak.

Minggu Keempat

1. Mengambil pedoman perusahaan bagian bendahara sebagai bahan pembuatan laporan kuliah kerja praktek di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.
2. Mulai mengambil data – data yang digunakan untuk lampiran – lampiran.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun pembahasan atas hasil kerja praktek yang dilakukan oleh penulis di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

3.3.1 Prosedur Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara

Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan pemungut pajak merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Ketua lembaga sebagai bendahara/bendahara proyek dan bendahara/pemegang kas pemerintah daerah.

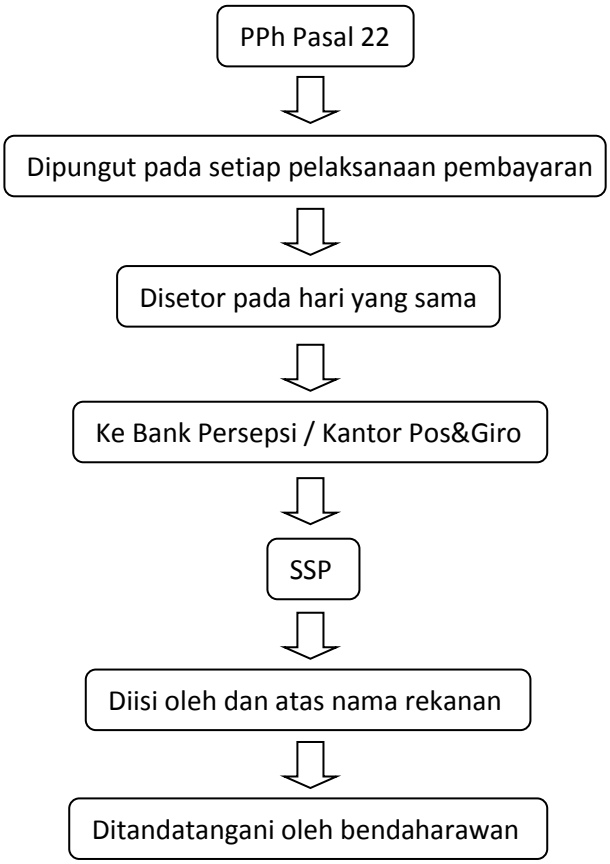
A. Bendahara sebagai Pemotong dan Pemungut PPh pasal 21

Adapun kewajban bendahara sebagai pemungut dan pemotong PPh Pasal 21 yaitu :

- Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- Menghitung, memotong, menyetor, dan melapor PPh yang terutang setiap bulan kalender termasuk laporan penghitungan PPh yang nihil
- Membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan
- Dalam hal terjadi kelebihan penyetoran PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 yang terutang pada suatu bulan kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPT Masa PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26
- Membuat dan memberikan bukti pemotongan pada saat dilakukan pemotongan pajak
- Mengambil sendiri formulir yang sudah ditetapkan dalam Dirjen Pajak

B. Bendahara sebagai Pemotong dan Pemungut PPh pasal 22

PPh Pasal 22 yang dipungut berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh wajib pajak (rekanan). Adapun tata cara pemotongan, pemungutan dan penyetoran adalah sebagai berikut:



Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 yaitu adanya SSP (Surat Setoran Pajak) :

Lembar ke-1 : Wajib pajak rekanan

Lembar ke-2 : KPP melalui KPPN

Lembar ke-3 : KPP sebagai lampiran SPT Masa bendaharawan

Lembar ke-4 : Kantor penerima pembayaran (Bank Persepsi / Kantor pos dan giro)

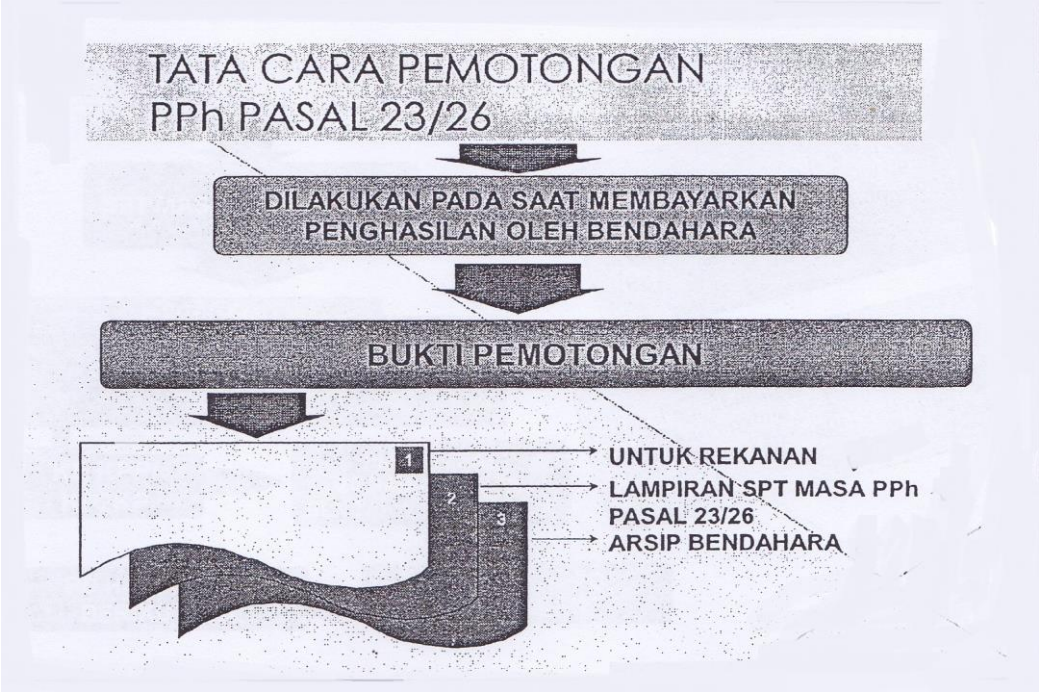
Lembar ke-5 : Pemungut PPh Pasal 22

C. Bendahara sebagai Pemotong dan Pemungut PPh Pasal 23/26

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23/26 antara lain :

- Hadiah dan penghargaan sehubungan dengan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21, dan
- Yang berasal dari modal berupa deviden, bunga, royalti

Adapun Tata cara pemotongan PPh Pasal 23/26 adalah sebagai berikut :

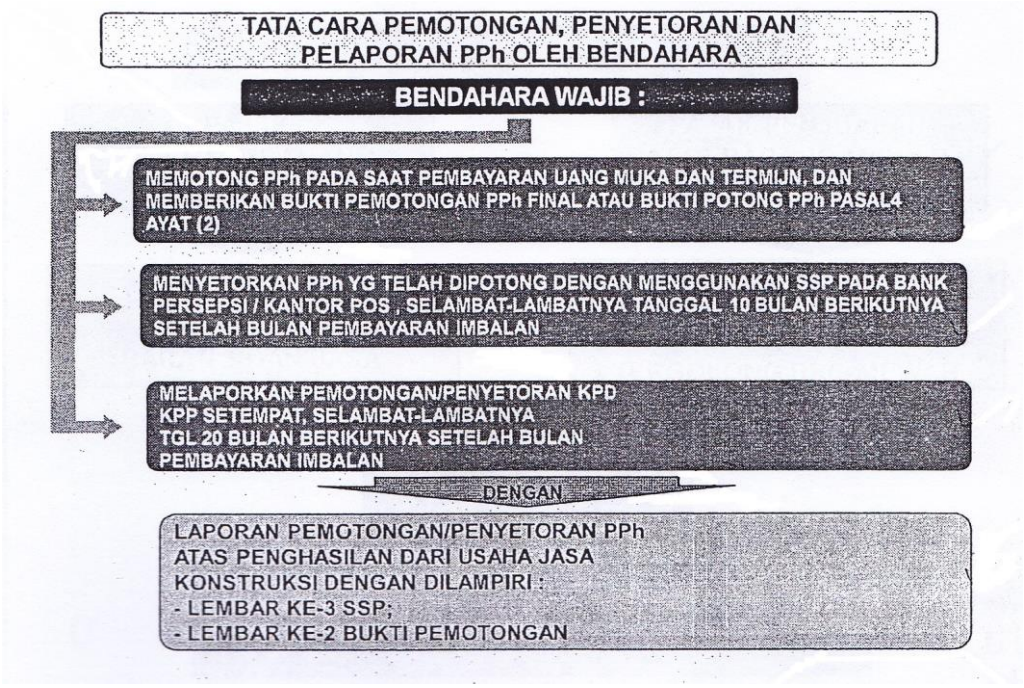


Gambar 3.1

Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 23/26

D. Bendahara sebagai Pemotong dan Pemungut PPh Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan menurut PP No.2009 Tahun 1996 dan PP No. 5 Tahun 2002. Adapun tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh oleh bendahara adalah sebagai berikut :

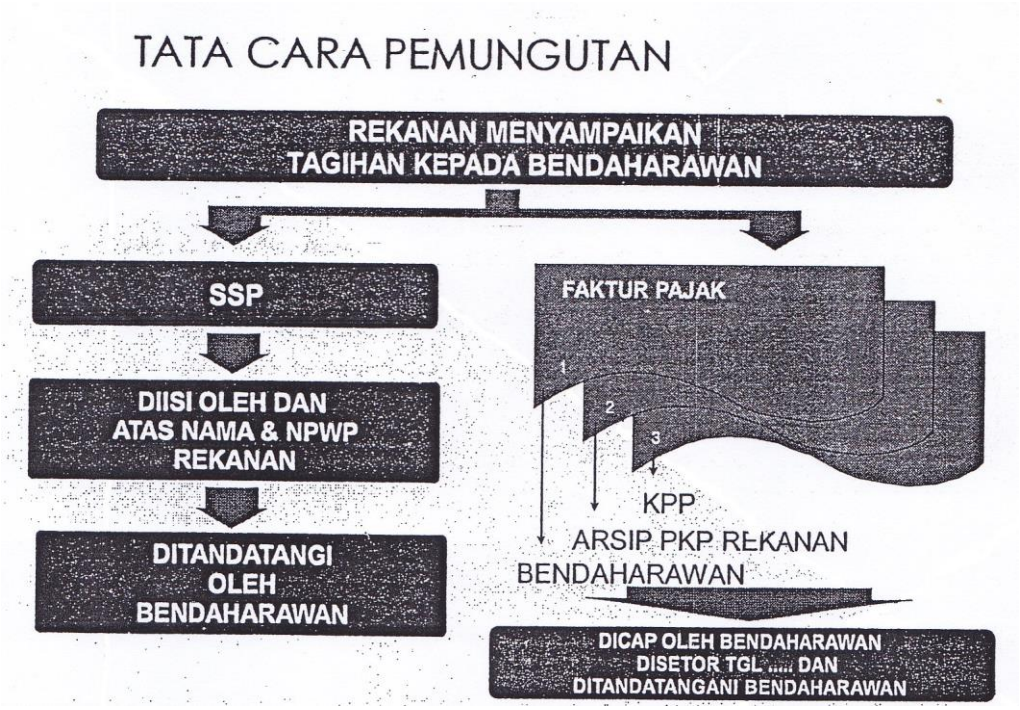


Gambar 3.2

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2)

E. Bendahara sebagai Pemotong dan Pemungut PPN dan PPnBM

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang berdasarkan KMK tergolong barang mewah. Syarat pemungutan PPN antara lain adanya penyerahan di dalam daerah pabean, yang diserahkan barang kena pajak / jasa kena pajak, yang menyerahkan adalah pengusaha kena pajak. Adapun tata cara pemungutan PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut :



Gambar 3.3

Tata Cara Pemungutan PPN dan PPnBM

3.3.2 Dokumen – Dokumen yang digunakan

Dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak secara langsung untuk kegiatan operasional perusahaan memerlukan dokumen-dokumen atau formulir yang terkait. Adapun dokumen atau formulir tersebut adalah :

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

BUKU PEMBANTU PAJAK
PER JENIS PAJAK

periode 3 Juni 2013 s/d 28 Juni 2013

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum
Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. H. IMING AKHMAD, M.Si
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu : UJANG SURYANA, S.Sos
Jenis Pajak : 4 Pajak Penghasilan Ps 21

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1	02/06/13		00.00	Saldo Awal	248.880.255,00		248.880.255,00
2	02/06/13		00.00	Saldo Awal		248.763.255,00	117.000,00
3	03/06/13	001/Gaji/1.03.01.01/BP/PPh.21VI/2013	00.00	Penerimaan PPh 21 dari Gaji PNS Gol. I,II,III,IV Bulan Juni 2013 pada DBMP Kota BDG	31.118.415,00		31.235.415,00
4	03/06/13	240-245/32.02/1.03.01.05/SSP/V/2013	32.02	Penyetoran PPh 21 atas lembur bulan April 2013, keg. 32.02		117.000,00	31.118.415,00
5	04/06/13	001/Gaji/1.03.01.01/SSP/PPh.21VI/2013	00.00	Penyetoran PPh 21 dari Gaji PNS Gol. I,II,III,IV Bulan Juni 2013 pada DBMP Kota BDG		31.118.415,00	
6	05/06/13	054/24.17/1.03.01.06/BP/PPh.21/VI/2013	24.17	Penerimaan PPh 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Januari s/d Februari 2013 Keg. 24.17	27.500,00		27.500,00
7	05/06/13	1-9/16.04/1.03.01.06/BP/VI/2013	16.04	Penerimaan PPh 21 honor tim pelaksana keg. Bln Maret s/d April 2013 keg 16.04	440.000,00		467.500,00
8	05/06/13	148-259/TPP/1.03.01.01/BP/VI/2013	00.00	Penerimaan PPh 21 dari Uang TPP Bulan Mei 2013 pada DBMP Kota Bandung	18.720.000,00		19.187.500,00
9	05/06/13	19-24/18.05/1.03.01.06/BP/VI/2013	18.05	Penerimaan PPh 21 honor tim pelaksana keg. Bln Maret s/d April 2013 keg 18.05	235.000,00		19.422.500,00
10	05/06/13	25-36/15.06/1.03.01.06/BP/VI/2013	15.06	Penerimaan PPh 21 honor tim pelaksana keg. Bln Maret s/d April 2013 keg 15.06	522.500,00		19.945.000,00
11	05/06/13	37-41/28.11/1.03.01.06/BP/PPh.21/VI/2013	28.11	Penerimaan PPh 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Maret s/d April 2013 Keg. 28.11	192.500,00		20.137.500,00
12	05/06/13	42-48/24.17/1.03.01.06/BP/PPh.21/VI/2013	24.17	Penerimaan PPh 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Maret s/d April 2013 Keg. 24.17	247.500,00		20.385.000,00
13	05/06/13	49-53/26.07/1.03.01.06/BP/PPh.21/VI/2013	26.07	Penerimaan PPh 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Maret s/d April 2013 Keg. 26.07	247.500,00		20.632.500,00
14	07/06/13	148-259/TPP/1.03.01.01/SSP/VI/2013	00.00	Penerimaan PPh 21 dari Uang TPP Bulan Mei 2013 pada DBMP Kota Bandung		18.720.000,00	1.912.500,00
15	10/06/13	1-9/16.04/1.03.01.06/SSP/VI/2013	16.04	Penyetoran PPh 21 honor tim pelaksana keg. Bln Maret s/d April 2013 keg 16.04		440.000,00	1.472.500,00
16	10/06/13	10-18/32.04/1.03.01.06/BP/VI/2013	32.04	Penerimaan PPh 21 honor tim pelaksana keg. Bln Maret s/d April 2013 keg 32.04	303.750,00		1.776.250,00
17	10/06/13	10-18/32.04/1.03.01.06/SSP/VI/2013	32.04	Penyetoran PPh 21 honor tim pelaksana keg. Bln Maret s/d April 2013 keg 32.04		303.750,00	1.472.500,00
18	10/06/13	104-119/15.03/1.03.01.03/BP/PPh.21/VI/2013	15.03	Penerimaan PPh.21 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa konstruksi dan Honor PPKm Kegiatan (15.03) Wil. Cibeunying	5.475.000,00		6.947.500,00
19	10/06/13	120 131/15.03/1.03.01.03/BP/PPh.21/VI/2013	15.03	Penerimaan PPh.21 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa konstruksi dan Honor PPKm Kegiatan (15.03) Wil. Ujungberung	4.285.000,00		11.232.500,00
20	10/06/13	132-143/15.03/1.03.01.03/BP/PPh.21/VI/2013	15.03	Penerimaan PPh.21 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa konstruksi dan Honor PPKm Kegiatan (15.03) Wil. Karees	4.235.000,00		15.467.500,00
21	10/06/13	19-24/18.05/1.03.01.06/SSP/VI/2013	18.05	Penyetoran PPh 21 honor tim pelaksana keg. Bln Maret s/d April 2013 keg 18.05		235.000,00	15.232.500,00
22	10/06/13	25-36/15.06/1.03.01.06/SSP/VI/2013	15.06	Penyetoran PPh 21 honor tim pelaksana keg. Bln Maret s/d April 2013 keg 15.06		522.500,00	14.710.000,00
23	10/06/13	55-70/15.03/1.03.01.03/BP/PPh.21/VI/2013	15.03	Penerimaan PPh.21 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa konstruksi dan Honor PPKm Kegiatan (15.03) Wil. Tegalega	6.255.000,00		20.965.000,00
24	10/06/13	71-86/15.03/1.03.01.03/BP/PPh.21/VI/2013	15.03	Penerimaan PPh.21 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa konstruksi dan Honor PPKm Kegiatan (15.03) Wil. Gedebage	5.847.500,00		26.812.500,00

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
25	10/06/13	87-98/15.03/1.03.01.03/BP/PPh.21/VI/2013	15.03	Penerimaan PPh.21 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa konstruksi dan Honor PPKm Kegiatan (15.03) Wil. Bojonagara	4.030.000,00		30.842.500,00
26	10/06/13	99-103/15.16/1.03.01.03/BP/PPh.21/VI/2013	15.16	Penerimaan PPh.21 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa konstruksi dan Honor PPKm Kegiatan (15.16)	1.052.500,00		31.895.000,00
27	11/06/13	002/Gaji/1.03.01.01/PPh.21/BP/VI/2013	00.00	Penerimaan PPh 21 dari rapel gaji Gol I, II, III, dan IV bulan Jan s/d Mei 2013 pada DBMP	19.911.996,00		51.806.996,00
28	11/06/13	054/24.17/1.03.01.06/SSP/PPh.21/VI/2013	24.17	Penyetoran PPh 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Januari s/d Pebruari 2013 Keg. 24.17		27.500,00	51.779.496,00
29	11/06/13	37-41/28.11/1.03.01.06/SSP/PPh.21/VI/2013	28.11	Penyetoran PPh 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Maret s/d April 2013 Keg. 28.11		192.500,00	51.586.996,00
30	11/06/13	42-48/24.17/1.03.01.06/SSP/PPh.21/VI/2013	24.17	Penyetoran PPh 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Maret s/d April 2013 Keg. 24.17		247.500,00	51.339.496,00
31	11/06/13	49-53/26.07/1.03.01.06/SSP/PPh.21/VI/2013	26.07	Penyetoran PPh 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Maret s/d April 2013 Keg. 26.07		247.500,00	51.091.996,00
32	12/06/13	104-119/15.03/1.03.01.03/SSP/PPh.21/VI/2013	15.03	Penyetoran PPh.21 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa konstruksi dan Honor PPKm Kegiatan (15.03) Wil. Cibeunying		5.475.000,00	45.616.996,00
33	12/06/13	120-131/15.03/1.03.01.03/SSP/PPh.21/VI/2013	15.03	Penyetoran PPh.21 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa konstruksi dan Honor PPKm Kegiatan (15.03) Wil. Ujungberung		4.285.000,00	41.331.996,00
34	12/06/13	132-143/15.03/1.03.01.03/SSP/PPh.21/VI/2013	15.03	Penyetoran PPh.21 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa konstruksi dan Honor PPKm Kegiatan (15.03) Wil. Karees		4.235.000,00	37.096.996,00
35	12/06/13	55-70/15.03/1.03.01.03/SSP/PPh.21/VI/2013	15.03	Penyetoran PPh.21 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa konstruksi dan Honor PPKm Kegiatan (15.03) Wil. Tegallega		6.255.000,00	30.841.996,00
36	12/06/13	71-86/15.03/1.03.01.03/SSP/PPh.21/VI/2013	15.03	Penyetoran PPh.21 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa konstruksi dan Honor PPKm Kegiatan (15.03) Wil. Gedebage		5.847.500,00	24.994.496,00
37	12/06/13	87-98/15.03/1.03.01.03/SSP/PPh.21/VI/2013	15.03	Penyetoran PPh.21 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa konstruksi dan Honor PPKm Kegiatan (15.03) Wil. Bojonagara		4.030.000,00	20.964.496,00
38	12/06/13	99-103/15.16/1.03.01.03/SSP/PPh.21/VI/2013	15.16	Penyetoran PPh.21 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa konstruksi dan Honor PPKm Kegiatan (15.16)		1.052.500,00	19.911.996,00
39	14/06/13	144-147/23.10/1.03.01.05/BP/PPh.21/VI/2013	23.10	Penerimaan PPh 21 atas honor tim pengelola keg bulan April s/d Mei 2013 Keg. 23.10	247.500,00		20.159.496,00
40	17/06/13	144-147/23.10/1.03.01.05/SSP/PPh.21/VI/2013	23.10	Penerimaan PPh 21 atas honor tim pengelola keg bulan April s/d Mei 2013 Keg. 23.10		247.500,00	19.911.996,00
41	17/06/13	261-276/16.03/1.03.01.03/BP/PPh.21/VI/2013	16.03	Penerimaan PPh 21 honorarium Panitia Pengadaan barang/jasa konstruksi dan honorarium PPKm Keg. 16.03	8.245.000,00		28.156.996,00
42	20/06/13	260/32.01/1.03.01.02/BP/VI/2013	32.01	Penerimaan PPh 21 atas honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber pada keg. Perencanaan PJU (32.01)	260.000,00		28.416.996,00
43	21/06/13	261-276/16.03/1.03.01.03/SSP/PPh.21/VI/2013	16.03	Penyetoran PPh 21 honorarium Panitia Pengadaan barang/jasa konstruksi dan honorarium PPKm Keg. 16.03		8.245.000,00	20.171.996,00
44	24/06/13	260/32.01/1.03.01.02/SSP/VI/2013	32.01	Penyetoran PPh 21 atas honorarium Tenaga ahli/ Instruktur/ Narasumber pada Keg. Perencanaan PJU (32.01)		260.000,00	19.911.996,00
45	26/06/13	277-278/03.05/1.03.01.01/PPh 21/BP/VI/2013	03.05	Penerimaan PPh 21 atas honorarium tim/panitia pelaksana keg. pd keg. pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kod rek. 03.05, Bln Jan s/d Mei 2013	306.250,00		20.218.246,00
46	26/06/13	279/05.03/1.03.01.01/PPh 21/BP/VI/2013	05.03	Penerimaan PPh 21 atas honorarium Panitia Pelaksana Keg. Pd Keg 05.03 Bln, Jan s/d Maret 2013	60.000,00		20.278.246,00
47	26/06/13	292-293/02.09/1.03.01.01/BP/VI/2013	02.09	Penerimaan PPh 21 honor tim Pengadaan barang dan jasa Keg. 02.09	65.000,00		20.343.246,00
48	26/06/13	294-295/02.10/1.03.01.01/PPh 21/BP/VI/2013	02.10	Penerimaan PPh 21 dari honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa pada Keg. 02.10	50.000,00		20.393.246,00
49	26/06/13	298-303/32.03/1.03.01.05/BP/PPh.21/VI/2013	32.03	Penerimaan PPh.21 Honorarium lembur Mei 2013	117.000,00		20.510.246,00
50	28/06/13	280-287/15.01/1.03.01.02/PPh.21/BP/VI/2013	15.01	Penerimaan PPh 21 atas honorarium Panitia Pelaks. Keg. utk Tim Pembuatan Gambar Rencana Keg. 15.01	850.000,00		21.360.246,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
51	28/06/13	288-291/16.01/1.03.01.02/PPh.21/BP/VI/2013	16.01 Penerimaan PPh 21 atas honorarium Panitia Pelaks. Keg. Tim Pembuatan Gambar RAB Keg. 16.01	200.000,00		21.560.246,00
52	28/06/13	296-297/15.15/1.03.01.03/BP/PPh.21/VI/2013	15.15 Penerimaan PPh.21 Honor tenaga ahli/instruktur/narasumber Bln Jan 2013 dan Bulan Mei 2013	600.000,00		22.160.246,00
				363.027.666,00	340.867.420,00	22.160.246,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

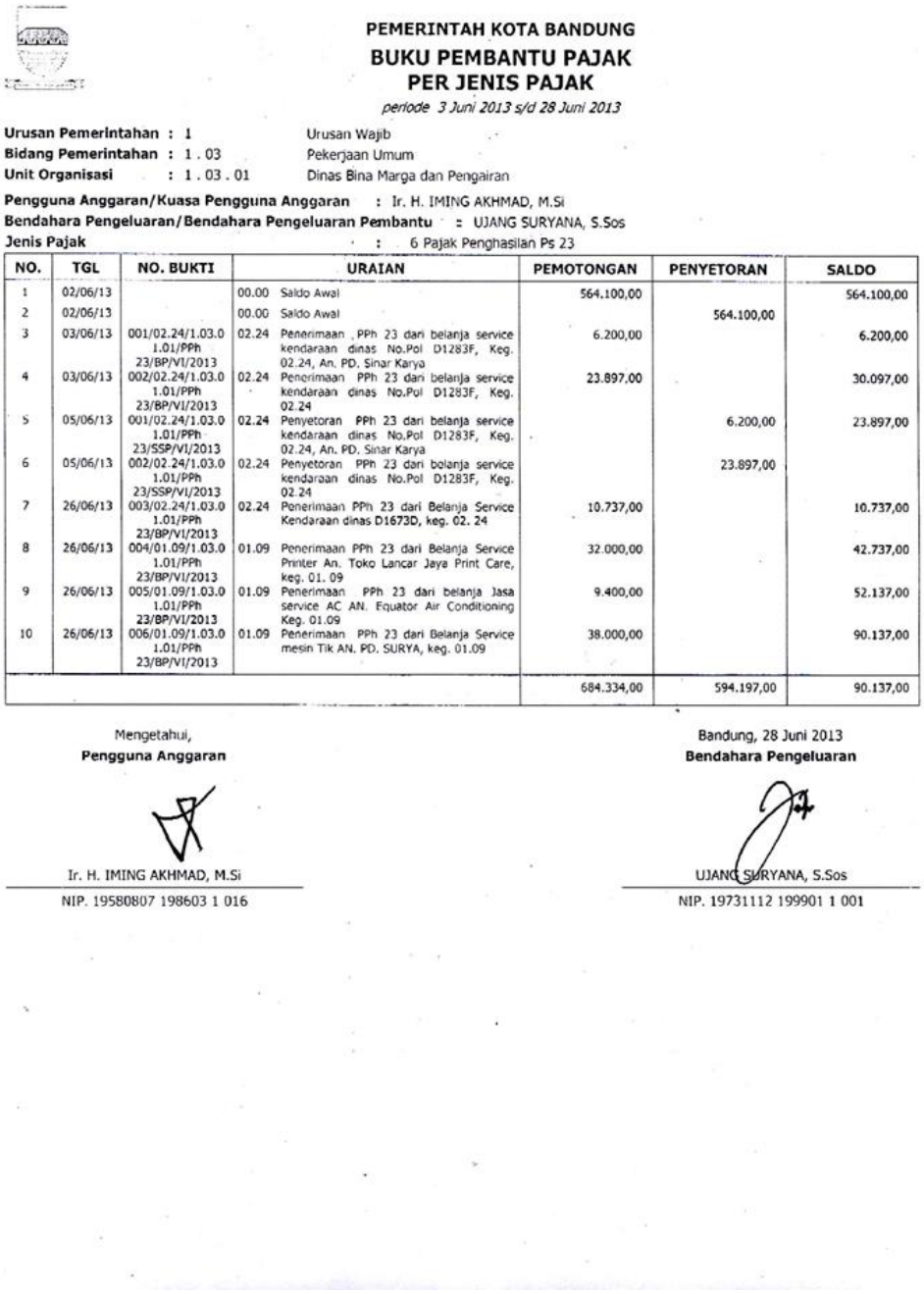
Ir. H. IMING AKHMAD, M.Si
NIP. 19580807 198603 1 016

Bandung, 28 Juni 2013
Bendahara Pengeluaran

UJANG SURYANA, S.Sos
NIP. 19731112 199901 1 001

Gambar 3.4

Buku Pembantu Pajak Per Jenis Pajak Penghasilan 21



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

BUKU PEMBANTU PAJAK
PER JENIS PAJAK

periode 3 Juni 2013 s/d 28 Juni 2013

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum
Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. H. IMING AKHMAD, M.Si
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu : UJANG SURYANA, S.Sos
Jenis Pajak : 6 Pajak Penghasilan Ps 23

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1	02/06/13		00.00	Saldo Awal	564.100,00		564.100,00
2	02/06/13		00.00	Saldo Awal		564.100,00	
3	03/06/13	001/02.24/1.03.0 1.01/PPh 23/BP/VI/2013	02.24	Penerimaan , PPh 23 dari belanja service kendaraan dinas No.Pol D1283F, Keg. 02.24, An. PD. Sinar Karya	6.200,00		6.200,00
4	03/06/13	002/02.24/1.03.0 1.01/PPh 23/BP/VI/2013	02.24	Penerimaan PPh 23 dari belanja service kendaraan dinas No.Pol D1283F, Keg. 02.24	23.897,00		30.097,00
5	05/06/13	001/02.24/1.03.0 1.01/PPh 23/SSP/VI/2013	02.24	Penyetoran PPh 23 dari belanja service kendaraan dinas No.Pol D1283F, Keg. 02.24, An. PD. Sinar Karya		6.200,00	23.897,00
6	05/06/13	002/02.24/1.03.0 1.01/PPh 23/SSP/VI/2013	02.24	Penyetoran PPh 23 dari belanja service kendaraan dinas No.Pol D1283F, Keg. 02.24		23.897,00	
7	26/06/13	003/02.24/1.03.0 1.01/PPh 23/BP/VI/2013	02.24	Penerimaan PPh 23 dari Belanja Service Kendaraan dinas D1673D, keg. 02. 24	10.737,00		10.737,00
8	26/06/13	004/01.09/1.03.0 1.01/PPh 23/BP/VI/2013	01.09	Penerimaan PPh 23 dari Belanja Service Printer An. Toko Lancar Jaya Print Care, keg. 01. 09	32.000,00		42.737,00
9	26/06/13	005/01.09/1.03.0 1.01/PPh 23/BP/VI/2013	01.09	Penerimaan PPh 23 dari belanja Jasa service AC AN. Equator Air Conditioning Keg. 01.09	9.400,00		52.137,00
10	26/06/13	006/01.09/1.03.0 1.01/PPh 23/BP/VI/2013	01.09	Penerimaan PPh 23 dari Belanja Service mesin Tik AN. PD. SURYA, keg. 01.09	38.000,00		90.137,00
					684.334,00	594.197,00	90.137,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

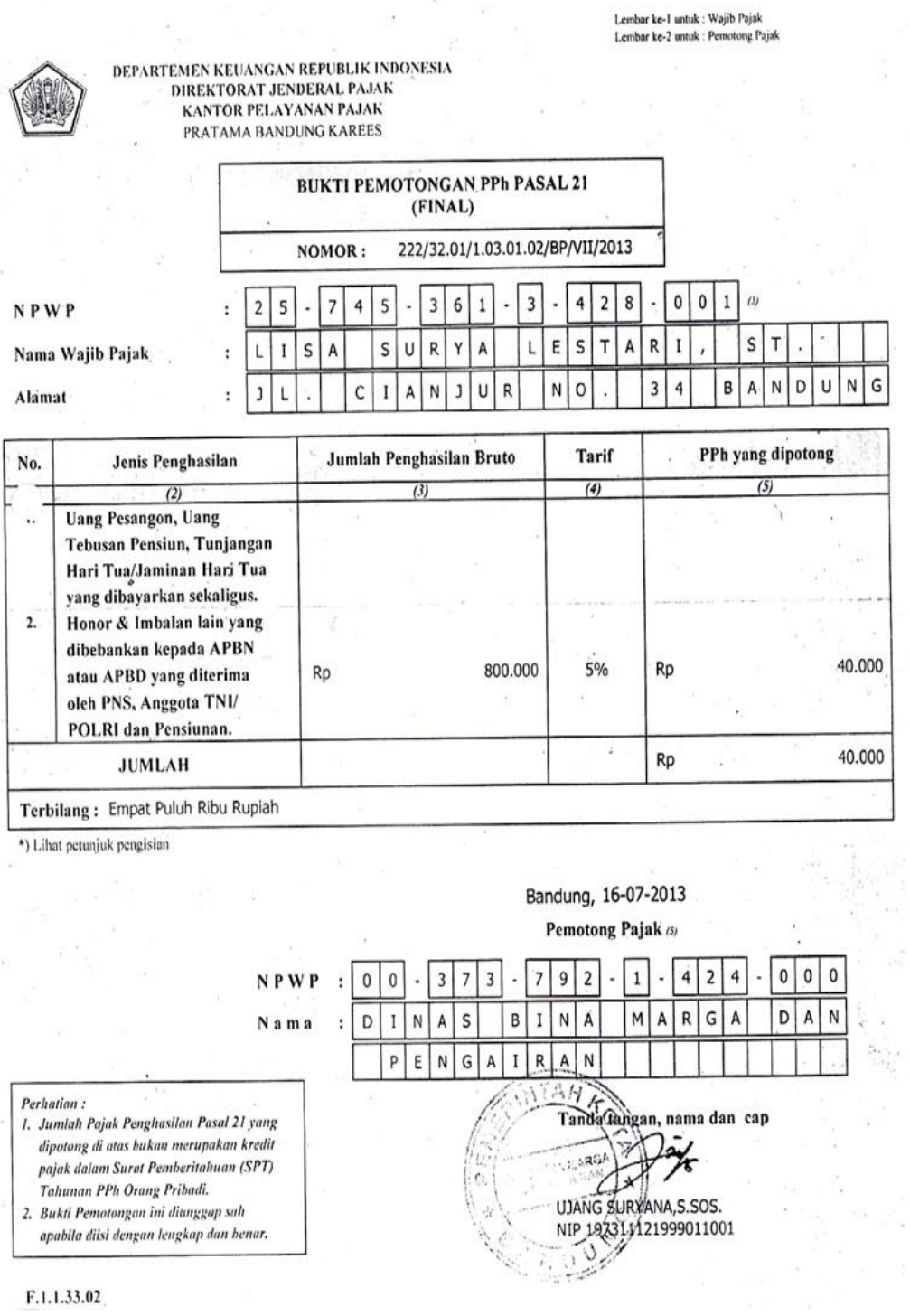
Ir. H. IMING AKHMAD, M.Si
NIP. 19580807 198603 1 016

Bandung, 28 Juni 2013
Bendahara Pengeluaran

UJANG SURYANA, S.Sos
NIP. 19731112 199901 1 001

Gambar 3.5

Buku Pembantu Pajak Per Jenis Pajak Penghasilah 23



Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANDUNG KAREES

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)

NOMOR : 222/32.01/1.03.01.02/BP/VII/2013

NPWP : 25-745-361-3-428-001 (1)

Nama Wajib Pajak : LISA SURYA LESTARI, ST.

Alamat : JL. CIANJUR NO. 34 BANDUNG

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong
	(2)	(3)	(4)	(5)
..	Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.			
2.	Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.	Rp 800.000	5%	Rp 40.000
JUMLAH				Rp 40.000

Terbilang : Empat Puluh Ribu Rupiah

*) Lihat petunjuk pengisian

Bandung, 16-07-2013

Pemotong Pajak (5)

NPWP : 00-373-792-1-424-000

Nama : DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

UJANG SURYANA,S.SOS.
NIP 197311121999011001

F.1.1.33.02

Gambar 3.6

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final)

1. Buku Pembantu Pajak Per Jenis Pajak Penghasilan 21

   Buku pembantu pajak penghasilan 21 dibuat berdasarkan periode jenis pajaknya . Dokumen ini dibuat untuk mengetahui anggaran-anggaran apa saja yang digunakan yang berupa pajak penghasilan 21 atas gaji dan honorarium. (Gambar 3.4)

2. Buku Pembantu Pajak Per Jenis Pajak Penghasilan 23

   Buku pembantu pajak penghasilan 23 dibuat berdasarkan periode jenis pajaknya . Dokumen ini dibuat untuk mengetahui anggaran-anggaran apa saja yang digunakan yang berupa pajak penghasilan 23 atas jasa service dan kendaraan dinas. (Gambar 3.5)

3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

   Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 merupakan bukti potong PPh Pasal 21 Final (Gambar 3.6)